

RENCANA KERJA TA. 2023



**PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION PAPUA**

RENCANA KERJA TA. 2023



**PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION PAPUA**



“Memupuk semangat untuk terus membangun Papua berbasis lingkungan”



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA
NOMOR : SK.070/P3E.Papua/KBTU/REN.0.0/12/2022

TENTANG
RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas bidang lingkungan hidup dan kehutanan ekoregion Papua perlu di susun Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Pusat perlu menetapkan Rencana Kerja Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/SET.1/07/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.1/1/2022 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA TAHUN 2023

KESATU : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023
2. Pengendalian Program dan Kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : 03 Desember 2022

KEPALA PUSAT

Edward Sembiring, S.Hut., M.Si
NIP. 197305301999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBAGUNAN EKOREGION PAPUA TAHUN 2023

Mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang beradaptasi dengan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan KLHK dalam rangka internalisasi Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 15 Tahun 2021 menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian pembangunan ecoregion Papua. Selain itu pengesahan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Baru di Papua, dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi menjadi tantangan juga bagi P3E Papua dalam meningkatkan pengendalian pembangunan di ecoregion Papua. Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan semangat yang besar yang akan terus dibangun demi mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Tahun 2023 merupakan awal penyesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perubahan struktur kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyesuaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pengendalian pembangunan ecoregion Papua tertuang dalam dokumen perencanaan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua. Kegiatan

pengendalian pembangunan ekoregion Papua tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua.

Dalam Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2020-2024, tercantum sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2023 yaitu 'Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua'. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari 2, yaitu (1) Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E dan (2) Jumlah Pemda yang di fasilitasi dan di bina di wilayah ecoregion. Pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 12.574.561.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni. Alokasi anggaran di bagi menjadi Belanja Opeasional dan Belanja Non Operasional.

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

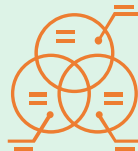
Kegiatan : Pengendalian Pembangunan LHK pada Wilayah Ekoregion
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregion Papua

IKK 1



Tingkat Kepuasan terhadap Layanan P3E
Target : 4 Poin

IKK 2



Jumlah Pemda yang di Fasilitas dan di Bina di Wilayah Ekoregion
Target : 8 Pemda



Realisasi Anggaran
Target : 99 Persen

KATA PENGANTAR

Tahun 2023 mempunyai tantangan tersendiri

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia

1

**CAPAIAN DAN PROGNOSIS
TAHUN 2022**

Capaian Kinerja Tahun 2021
Prognosis Capaian Kinerja
Tahun 2022

2

PENUTUP
Kesimpulan
Saran

4

RENCANA KERJA

Sasaran Kegiatan
Rincian Kegiatan
Metode Pengukuran Kinerja

3



1. Pendahuluan

Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Papua merupakan dokumen perencanaan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satker sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja menjembatani antara perencanaan pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua dengan Renja Sekretariat Jenderal, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMN). Renja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis, yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua dan pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pasal 652, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretariat Jenderal. Pada Pasal 654 dijelaskan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion, selanjutnya pada Pasal 655 di jelaskan untuk melaksanakan tugas ebagaimana dimaksud dalam Psasal 652 dan Pasal 653 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua didukung oleh 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing membawahi 1 Sub Bidang.

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi. Bagian Tata Usaha terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas Subbidang Fasilitasi Integrasi

Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

- e. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- f. pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang integrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion. Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

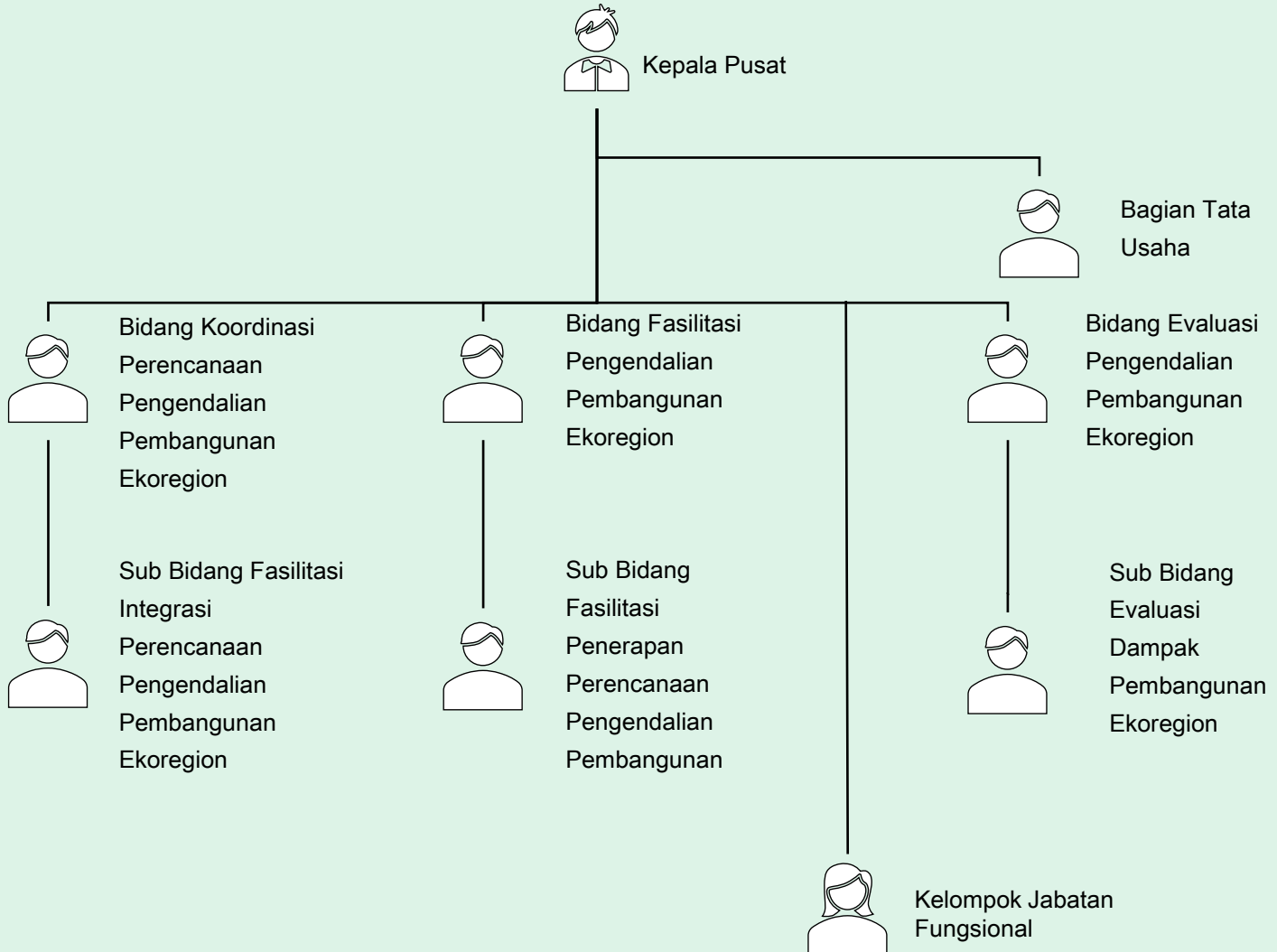
Dalam melaksanakan tugas Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

- b. pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

STRUKTUR ORGANISASI



SUMBER DAYA MANUSIA

Faktor penting dalam mendukung perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja adalah sumber daya manusia yang profesional. Pegawai pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua tahun 2023 sebanyak 38 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 76,32 % atau 29 orang dan perempuan sebanyak 23,67 % atau 9 orang.

Dari total 38 pegawai 19 orang merupakan lulusan Sarjana (S1), 8 orang adalah lulusan Magister (S2), 7 orang lulusan SMA, 3 orang lulusan D3 dan 1 orang lulusan SMP/ Sederajat. Dari total 38 pegawai sebanyak 25 orang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 13 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Distribusi pegawai pada P3E Papua yaitu sebanyak 6 orang pada Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, sebanyak 7 orang pada Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion, sebanyak 4 orang pada Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan sebanyak 21 orang pada Bagian Tata Usaha.



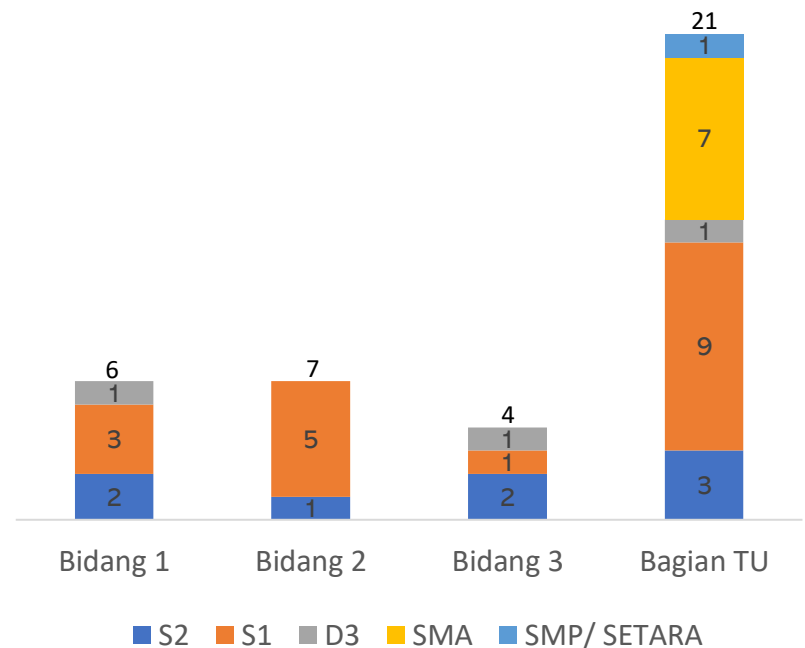
76,32 %

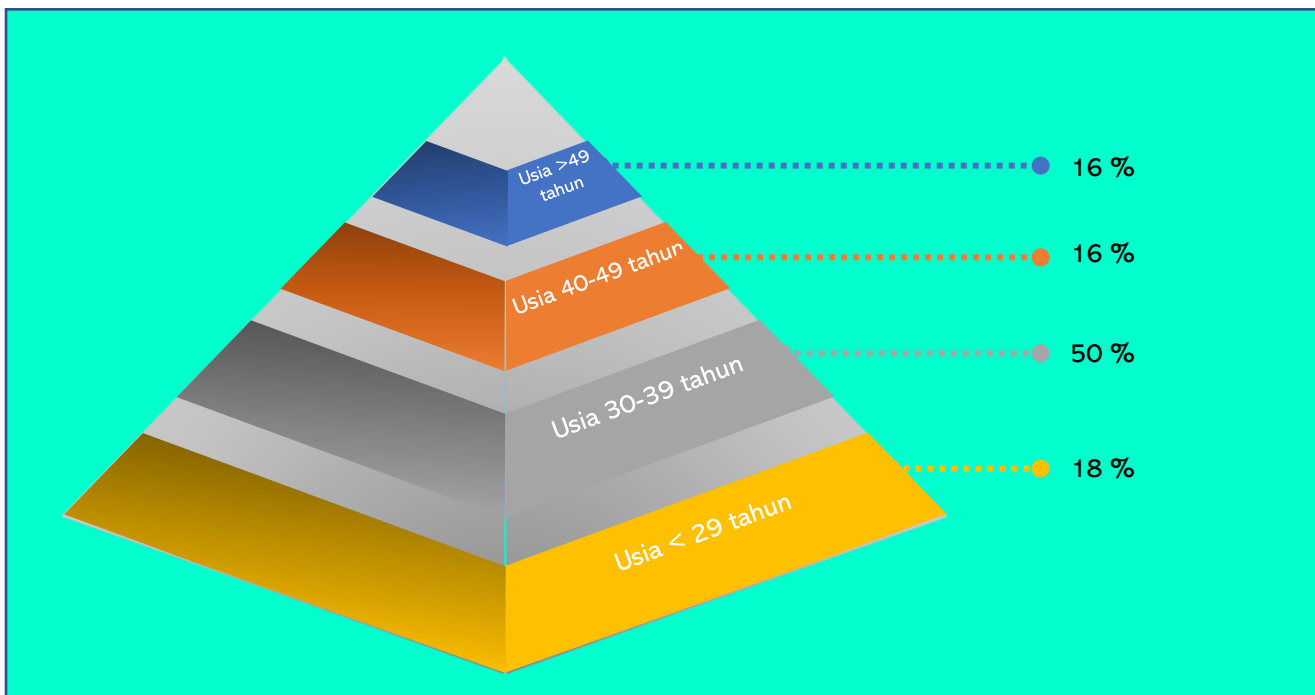
Jumlah pegawai Laki-laki = 29 orang



23,67 %

Jumlah pegawai Perempuan = 9 orang





Piramida sumber daya manusia di P3E Papua menunjukkan kelompok interval usia pegawai sepuluh tahunan. Dasar grafik piramida adalah usia termuda dan semakin tua ke atas. Struktur pegawai P3E Papua baik ASN maupun Non ASN diketahui mayoritas adalah pegawai dengan rentang usia 30-39 tahun sebanyak 19 orang, disusul oleh pegawai dengan rentang usia < 29 tahun sebanyak 7 orang, dan pegawai dengan rentang

usia 40-49 tahun dan rentang usia > 49 tahun masing-masing sebanyak 6 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pegawai P3E Papua didominasi oleh pegawai dengan rentang usia 30-39 tahun, cenderung produktif, kreatif dan penuh semangat dalam bekerja.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

Adaptif

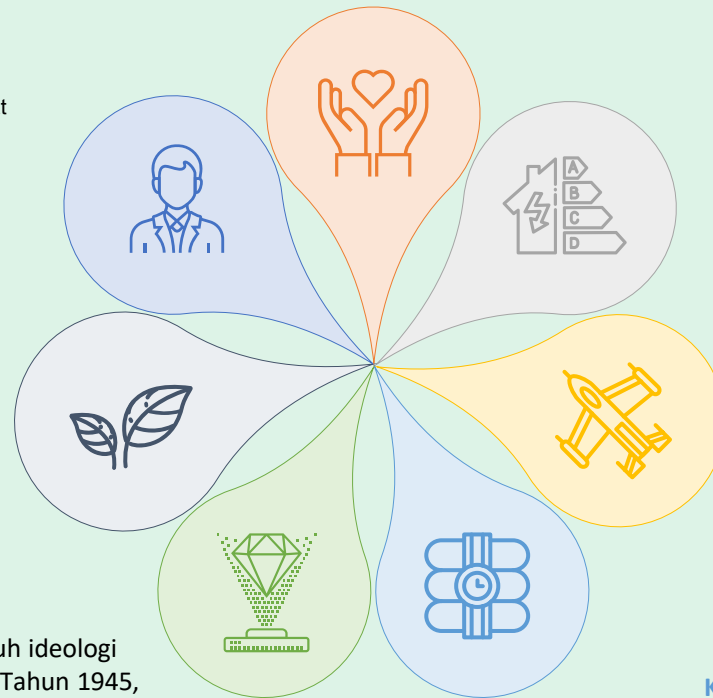
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak positif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI seta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama



2. Capaian 2021 dan Prognosis 2022

CAPAIAN TAHUN 2021

INVENTARISASI DAN PERHITUNGAN DDDT DI WILAYAH EKOREGION

Target : 2 Dokumen
Realisasi : 2 Dokumen

01

RENCANA PENGELOLAAN SDALH DI WILAYAH EKOREGION

Target : 2 Dokumen
Realisasi : 2 Dokumen

02

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LHK DAN PENERAPAN PROGRAM STRATEGIS LHK

Target : 1 Dokumen
Realisasi : 1 Dokumen

03

TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN P3E

Target : 4 Poin
Realisasi : 4.38 Poin

04

CAPAIAN INVENTARISASI DAN DDDT DI WILAYAH EKOREGION

Inventarisasi dan perhitungan DDDTLH wilayah ekoregion Papua merupakan salah satu indikator kinerja kegiatan yang menggambarkan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk memberikan layanan jasa bagi perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui fungsi penyedia, pengatur, pendukung dan budaya. Tujuan inventarisasi dan perhitungan DDDT yaitu untuk mengetahui kemampuan kapasitas dan ketersediaan SDA/ jasa ekosistem dalam memproduksi sumber daya dan menyerap limbahnya

sehingga pembangunan yang dilakukan tetap menjaga keseimbangan alam.

Indikator Kinerja Kegiatan Inventarisasi dan Perhitungan DDDT di wilayah ekoregion Papua yaitu Dokumen Inventarisasi DDDT di Ekoregion dan Laporan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT.

Capaian

- Dokumen Integrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Rangka Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Keerom dan Kota Sorong.
- Laporan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT.



Outcome

- Rekomendasi dan arahan mitigasi bencana banjir berdasarkan kondisi DDDTLH yang diintegrasikan serta di sinkronisasikan dengan berbagai program mitigasi yang direncanakan oleh stakeholder.
- Peningkatan pemahaman aparat Pemerintah Daerah dalam penyusunan DDDTLH berbasis jasa lingkungan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Kegiatan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam inventarisasi SDALH dan perhitungan DDDT dilaksanakan di enam (6) Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten

Jayapura, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Raja Ampat.

CAPAIAN RENCANA PENGELOLAAN SDALH DI WILAYAH EKOREGION

Rencana pengelolaan SDALH di Wilayah Ekoregion merupakan IKK yang menggambarkan arahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan isu strategis di wilayah ekoregion. Dokumen rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah ekoregion.

Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah ekoregion adalah Dokumen Rencana Pengelolaan

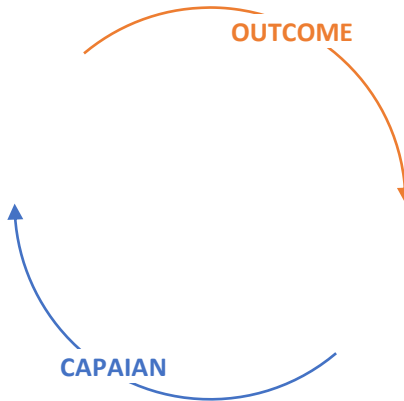
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sektor Kehutanan, Pertanian dan Jasa Lingkungan, dan Laporan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Berbasis DDDTLH.

Tahun 2021 Rencana Pengelolaan SDALH di laksanakan di Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari Selatan.



Capaian

- Dokumen RPSDALH Sektor Kehutanan, Pertanian, dan Jasa Lingkungan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Sorong
- Laporan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari Selatan.



OUTCOME

- Strategi, rekomendasi dan rencana aksi pengelolaan SDALH di Sektor Kehutanan, Pertanian dan Jasa Lingkungan di Kabupaten Nabire dan Kota Sorong.
- Arahan pengelolaan SDALH dalam internalisasi penyusunan kebijakan terkait LHK (Instrumen RPPLHD, KLHS, dll)

CAPAIAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN LHK DAN PENERAPAN PROGRAM STRATEGIS LHK

Evaluasi pembangunan LHK dan penerapan program strategis LHK dilakukan melalui penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi, uji kualitas lingkungan, dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan di wilayah ekoregion.

Indikator Kinerja Kegiatan hasil evaluasi pembangunan dan penerapan program strategis LHK adalah Dokumen Hasil Evaluasi Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK yang memuat:

- a. Evaluasi pembangunan LHK
- b. Evaluasi pencapaian indeks kualitas lingkungan di Daerah
- c. Pengembangan laboratorium di daerah
- d. Pemantauan kualitas lingkungan dan tindak lanjut hasil evaluasi

Dokumen Hasil Pelaksanaan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDALH di wilayah ecoregion Papua memuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan SDALH, pelaksanaan uji kualitas lingkungan, dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan SDALH

- Evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup melalui gerakan peduli berbudaya lingkungan di Papua
- Pemantauan lapangan dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembangunan dan penerapan program strategis di Ekoregion Papua
- Evaluasi pelaksanaan program strategis LHK melalui Jakstrada pengelolaan sampah di Raja Ampat
- Evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup melalui Gerakan peduli berbudaya lingkungan di Papua Barat

Pelaksanaan Uji Kualitas Lingkungan

- Pendampingan identifikasi risiko pencemaran lingkungan akibat limbah medis covid-19 di Provinsi Papua
- Bimbingan teknis perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Papua
- Evaluasi pemantauan kualitas air laut dan pesisir pada lokasi strategis kepulauan Raja Ampat.
- Bimbingan teknis pengambilan sampel parameter kualitas lingkungan di Provinsi Papua Barat.
- Rapat kerja pengelolaan laboratorium lingkungan daerah dalam lingkup Provinsi Papua dan Papua Barat

Tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

- Bimbingan teknis Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) di Kabupaten Supiori.
- Bimbingan teknis Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) di Jayapura.
- Pendampingan komunitas masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber di Kabupaten Supiori
- Pendampingan komunitas masyarakat dalam mengolah sampah dari sumbernya di mada pandemic di Kabupaten Jayapura.
- Rapat kerja pelaksanaan pembangunan dan penerapan program strategis di Ekoregion Papua di Kota Jayapura

CAPAIAN TINGKAT KEPUASAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN P3E

4.38

Tingkat kepuasan layanan P3E Papua berdasarkan hasil analisa dengan metode Skala Likert.

Layanan	Tingkat Kepuasan	Tingkat Kepentingan
Layanan Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT	4.39	4.67
Layanan Penyusunan RPSDALH berbasis DDDT	4.23	4.79
Layanan Evaluasi Pengelolaan SDALH	4.53	3.38

Survey kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua tahun 2021 secara efektif dilaksanakan selama 12 bulan. Bentuk Layanan yang diberikan P3E Papua terdiri dari tiga (3) layanan, yaitu Layanan Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT, Layanan Penyusunan RPSDALH berbasis DDDT, dan Layanan Evaluasi Pengelolaan SDALH. Jumlah responden survey sebanyak 255 orang yang terdiri dari Pemerintah Provinsi/ Kota dan Kabupaten, UPT KLHK di ekoregion Papua dan kelompok akademisi. Responden survey adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan

oleh P3E Papua, baik sebagai peserta kegiatan, narasumber kegiatan maupun moderator kegiatan.

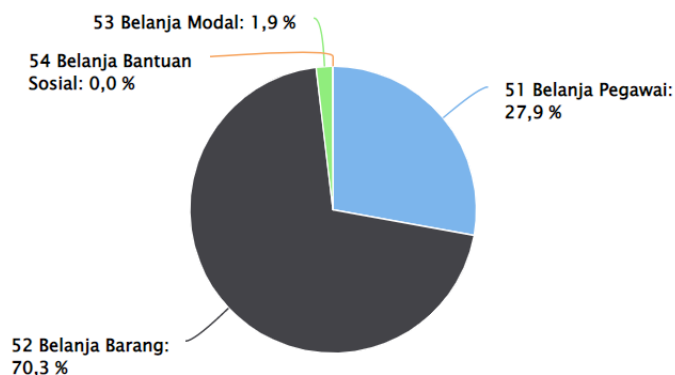
Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua sebesar 4.38 menunjukkan pengguna layanan P3E Papua puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai SKM setelah dikonversi adalah 87.60 menunjukkan mutu pelayanan B (Baik).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja P3E Papua dalam memberikan layanan publik adalah baik.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

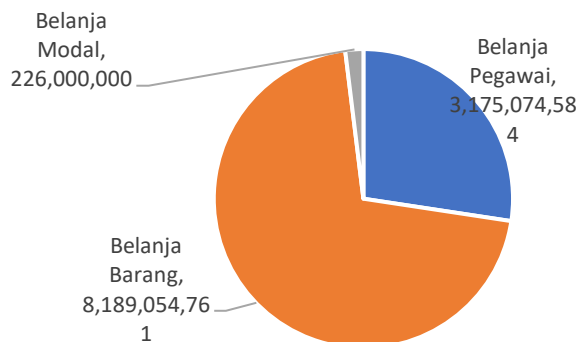
Pagu anggaran awal P3E Papua tahun 2021 sebesar Rp. 13.435.688.000,-. Tahun bulan Juli 2021 terdapat refocusing anggaran sebanyak dua tahap, yaitu tahap I sebesar Rp.963.225.000,- dan tahap II sebesar Rp.498.223.000,- sehingga pagu anggaran akhir tahun 2021 sebesar Rp.11.974.240.000,-. Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.11.590.129.202,- atau 97.44%.

Komposisi Alokasi Anggaran



Jenis Belanja	Alokasi Anggaran
Belanja Pegawai	Rp. 3.336.441.000
Belanja Barang	Rp. 8.411.329.000
Belanja Modal	Rp. 226.470.000
Jumlah	Rp. 11.974.240.000

Komposisi Realisasi Anggaran



Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi
Belanja Pegawai	3,336,441,000	3,175,074,584	95.16
Belanja Barang	8,411,329,000	8,189,054,761	97.36
Belanja Modal	226,470,000	226,000,000	99.79
Jumlah	11,974,240,000	11,590,129,345	97.44

Perubahan Pagu Anggaran P3E Papua Tahun 2021

IKK/ KRO/ RO	PAGU AWAL	REVISI I	REVISI II (REFOCUSING TAHAP I)	REVISI III (REFOCUSING TAHAP II)	TOTAL REFOCUSING	REALISASI	SISA PAGU
01. Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung di Wilayah Ekoregion	Rp 1,520,000,000	Rp 1,520,000,000	Rp 1,195,000,000	Rp 1,195,000,000	Rp 325,000,000	Rp 997,247,900	Rp 197,752,100
02. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion	Rp 1,520,000,000	Rp 1,520,000,000	Rp 1,195,600,000	Rp 1,195,600,000	Rp 324,400,000	Rp 1,191,887,600	Rp 3,712,400
03. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Rp 1,945,000,000	Rp 1,945,000,000	Rp 1,631,175,000	Rp 1,631,175,000	Rp 313,825,000	Rp 1,630,683,875	Rp 491,125
04. Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	Rp 117,430,000	Rp 117,430,000	Rp 117,430,000	Rp 117,430,000	Rp -	Rp 117,430,000	Rp -
Layanan Dukungan Manajemen Satker P3E Papua	Rp 1,147,570,000	Rp 882,570,000	Rp 882,570,000	Rp 882,570,000	Rp -	Rp 879,512,050	Rp 3,057,950
Layanan Sarana Internal	Rp -	Rp 265,000,000	Rp 265,000,000	Rp 226,470,000	Rp 38,530,000	Rp 226,000,000	Rp 470,000
Layanan Perkantoran:							
01. Gaji dan Tunjangan	Rp 3,796,134,000	Rp 3,796,134,000	Rp 3,796,134,000	Rp 3,336,441,000	Rp 459,693,000	Rp 3,175,074,584	Rp 161,366,416
02. Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3e Papua	Rp 3,389,554,000	Rp 3,389,554,000	Rp 3,389,554,000	Rp 3,389,554,000	Rp -	Rp 3,372,293,193	Rp 17,260,807
JUMLAH	Rp 13,435,688,000	Rp 13,435,688,000	Rp 12,472,463,000	Rp 11,974,240,000	Rp 1,461,448,000	Rp 11,590,129,202	Rp 384,110,798

PROGNOSIS 2022

Perjanjian Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2022 antara Sekretaris Jenderal dengan Kepala P3E Papua yang di tandatangani pada bulan desember 2021 terdiri dari 4 indikator kinerja kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.435.688.000,-. Pada bulan desember 2022 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja yaitu perubahan pagu anggaran menjadi Rp.11.822.081.000 sedangkan indicator kinerja kegiatan tetap sebanyak 4 indikator.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
Pengendalian Pembangunan LHK Regional	Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua	01-Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	8	Daerah
		02-Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	8	Daerah
		03-Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	8	Daerah
		04-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4	Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)

EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Layanan umum P3E Papua	1	Layanan	1.055.661
	001-Layanan Perkantoran P3E Papua	2	Layanan	6.966.420
EBB_Layanan Sarana dan Prasarana Internal	001-Layanan Sarana Internal P3E Papua	15	Unit	100.000
FBA_Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	8	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.700.000

CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN 2022



Indikator Kegiatan 1. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion dilakukan dengan memberikan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan bidang LH. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel dengan melibatkan UPT KLHK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan lingkup Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai narasumber dan peserta kegiatan.
- b. Inventarisasi perencanaan bidang lingkungan hidup

dan kehutanan (kluster Sorong), dilaksanakan dengan melibatkan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, KPHP/ KPHL, dan UPT KLHK di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat sebagai narasumber dan peserta kegiatan.

- c. Inventarisasi perencanaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan (kluster Jayapura), dilaksanakan dengan melibatkan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, KPHP/ KPHL dan UPT KLHK di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi sebagai narasumber dan peserta kegiatan.

- d. FGD Isu Tematik (FOLU Net Sink 2030 dan Perhutanan Sosial), dilaksanakan dengan melibatkan UPT KLHK lingkup Provinsi Papua dan Papua Barat, Bappeda, Dinas LH dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion dilaksanakan dengan memperhatikan isu pokok perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion, yaitu:

- a. Pencapaian target IKLH
- b. Penguatan regulasi perencanaan daerah Kabupaten/ Kota
- c. Percepatan program perhutanan sosial, dan
- d. Implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030

Kegiatan yang telah dilaksanakan menghasilkan rumusan kegiatan yang akan menjadi rekomendasi bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan upaya pengendalian pembangunan ekoregion secara berkelanjutan.

Target capaian output layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion sebanyak 8 daerah telah tercapai 100 persen yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi.

Indikator Kegiatan 2. Layanan Pembinaan Penerapan

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah ekoregion Papua

Layanan pembinaan PPKL, PSLB3 dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengendalian pembangunan ekoregion kepada Pemerintah Daerah. Layanan fasilitasi yang di berikan terdiri dari 4 layanan yaitu a) fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan; b) fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan; c) fasilitasi pengelolaan sampah; dan d) fasilitasi pengelolaan Limbah B3.

- a) Fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan;
Ruang lingkup fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan adalah mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada provinsi/ kabupaten/ kota di wilayah ekoregion Papua, sesuai target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota atau sesuai target IKLH pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/ 4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

- b) Fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan;
Ruang lingkup fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan adalah meningkatkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sehingga dapat mendorong nilai IKLH. Fasilitasi yang diberikan dalam bentuk bimbingan teknis kepada daerah agar

mampu mengidentifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- c) Fasilitasi pengelolaan sampah; dan Ruang lingkup pengelolaan sampah dibatasi pada upaya mendukung Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA). Hal ini selaras dengan sasaran strategis KLHK dalam mencapai target nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di tahun 2024 sebesar 70 poin (Rencana Strategis KLHK 2020-2024) serta permasalahan peningkatan timbulan sampah di ekoregion Papua sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, ekonomi dan pembangunan. Kinerja pengelolaan sampah dikelompokkan menjadi kinerja pengurangan dan penanganan sampah. Kinerja pengurangan sampah dinilai dari kemampuan daerah untuk melakukan pembatasan timbulan sampah, daur-ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kinerja penanganan sampah dinilai dari kemampuan daerah dalam upaya pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

- d) Fasilitasi pengelolaan Limbah B3

Ruang lingkup fasilitasi penerapan pengelolaan limbah dan B3 dibatasi pada upaya inventarisasi potensi timbulan limbah dan B3 serta sosialisasi peraturan terkini tentang limbah dan B3.

Capaian target Layanan Pembinaan Penerapan PPKL, PSLB3 di wilayah ekoregion Papua sebanyak 8 daerah telah tercapai 100 persen, yaitu

1. Kota Jayapura
2. Kabupaten Keerom
3. Kabupaten Nabire
4. Kabupaten Mimika
5. Kabupaten Sarmi
6. Kabupaten Manokwari
7. Kabupaten Sorong
8. Kota Sorong

Matriks Capaian Layanan pembinaan penerapan PPKL, PSLB3 ditunjukkan sebagai berikut.

Layanan Pembinaan PPKL, PSLB3 di Ekoregion Papua	Kegiatan	Lokus
Fasilitasi pengendalian pencemaran wilayah ecoregion	Koordinasi Stakeholder: Dirjen PPKL, DKLH Provinsi Papua, DLHP Provinsi Papua Barat Pembinaan laboratorium lingkungan daerah: • Bimbingan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari Bimbingan teknis: • Bimbingan teknis pengambilan dan pengujian sampel parameter kualitas air di Kota Jayapura Pemantauan lapangan dalam rangka penentuan titik koordinat/ titik pengambilan sampel air. Pendampingan tata cara penginputan data IKLH pada link https://ppkl.menlhk.go.id/	Kabupaten Manokwari Kota Jayapura • Kabupaten Mimika • Kota Jayapura • Kabupaten Sarmi • Kabupaten Supiori • Kota Jayapura • Kabupaten Teluk Wondama • Kabupaten Kaimana
Fasilitasi pengendalian kerusakan wilayah ecoregion	Koordinasi Satkeholder: Dijen PPKL, DLH Kabupaten Jayapura, DLH Kabupaten Sarmi, DLH Kabupaten Keerom, DLH Kabupaten Biak Numfor, DLH Kabupaten Merauke, Kota Jayapura	
Fasilitasi pengelolaan sampah wilayah ecoregion	Koordinasi Stakeholder: Dirjen PSLB3, Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Sosialisasi: • Pendampingan pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire • Pendampingan pengelolaan sampah di Kabupaten Keerom Supervisi/ Pemantauan lapangan: mengidentifikasi kondisi fisik pengelolaan sampah yang merupakan implementasi dari perencanaan daerah (Jakstrada) tentang pengelolaan sampah	• Kabupaten Nabire • Kabupaten Keerom

Layanan Pembinaan PPKL, PSLB3 di Ekoregion Papua	Kegiatan	Lokus
Fasilitasi pengelolaan limbah B3	Koordinasi Stakeholder: Bimbingan teknis: • Bimbingan teknis pengelolaan limbah medis di Jayapura	• Kota Jayapura

Indikator 3. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion terdiri dari 5 (lima) yaitu (a) evaluasi penerapan pengendalian pencemaran wilayah ecoregion, (b) evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah ecoregion, (c) evaluasi penerapan pengendalian pengelolaan sampah wilayah ecoregion, (d) evaluasi penerapan pengelolaan limbah B3 wilayah ecoregion dan (e) evaluasi dampak pembangunan ekoregion

Capaian target layanan evaluasi pengendalian pembangunan ecoregion Papua tahun 2022 sebanyak

8 daerah telah tercapai 100 persen, yaitu

1. Kota Sorong
2. Kabupaten Sorong
3. Kabupaten Sorong Selatan
4. Kabupaten Manokwari
5. Kabupaten Kepulauan Yapen
6. Kabupaten Merauke
7. Kabupaten Manokwari Selatan
8. Kabupaten Nabire
9. Kabupaten Boven Digoel

Matriks capaian layanan evaluasi pengendalian pembangunan ecoregion Papua ditunjukkan sebagai berikut.

Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Kegiatan	Lokus
Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi titik pantau kualitas air di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan • Monitoring dan evaluasi titik pantau kualitas air di Sorong Raya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Manokwari • Kabupaten Manokwari Selatan • Kota Sorong • Kabupaten Sorong • Kabupaten Sorong Selatan • Kabupaten Maybrat
Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi penyesuaian dokumen perencanaan Taman Nasional Wasur berbasis jasa lingkungan • Evaluasi Penyesuaian Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Boven Digoel 	<p>Kabupaten Merauke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Boven Digoel
Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penyusunan Dokumen Jakstrada Pengelolaan Sampah dan Integrasi Data Pengelolaan Sampah Dalam SIPSN Kabupaten Nabire • Monitoring dan Evaluasi Penerapan Jakstrada dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Nabire 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Nabire
Evaluasi Penerapan Pengendalian Limbah B3 Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Yapen • Monitoring dan Identifikasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan 	<p>Kabupaten Kepulauan Yapen</p> <p>Kabupaten Sorong Selatan</p>
Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Identifikasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan • Monitoring dan Identifikasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sorong 	<p>Kabupaten Sorong Selatan</p> <p>Kabupaten Sorong</p>

Indikator 4. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E

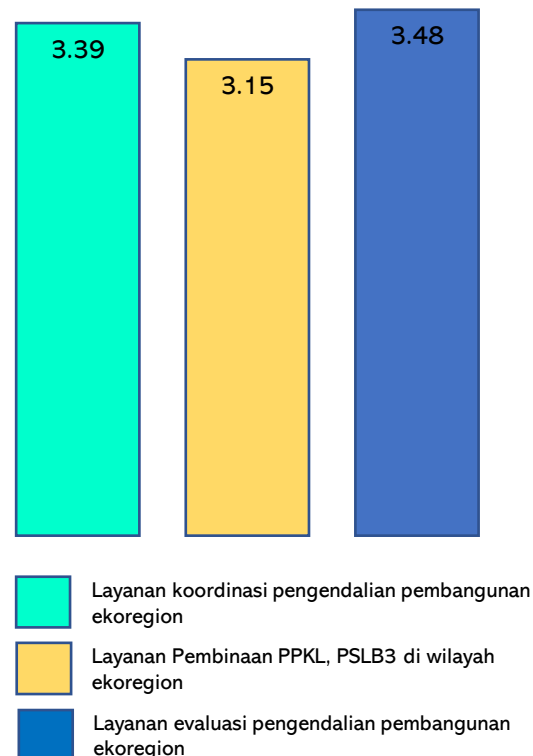
Survey tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua tahun 2022 di laksanakan selama 12 bulan pada 18 kegiatan. Teknik survey menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan (kuisisioner) yang diberikan kepada 379 orang responden. Survey dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan P3E Papua. Layanan dimaksud terdiri dari 3 (tiga), yaitu Layanan koordinasi pengendalian pembangunan ecoregion, Layanan Pembinaan PPKL, PSLB3 di wilayah ecoregion dan Layanan evaluasi pengendalian pembangunan ecoregion.

Target tingkat kepuasan kepuasan public terhadap layanan P3E adalah 4 Poin, capaian tahun 2023 adalah 3.34 poin atau 83,50 persen.

Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua sebesar 3.34 menunjukkan pengguna layanan P3E Papua puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Nilai SKM setelah dikonversi adalah 83,50 menunjukkan mutu pelayanan B. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja P3E Papua dalam memberikan layanan publik adalah baik.

3.34

Tingkat kepuasan layanan P3E Papua berdasarkan hasil analisa dengan metode Skala Likert.



CAPAIAN REALISASI ANGGARAN 2022

Pagu awal Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua sebesar Rp.13.435.688.000,-. Selama tahun anggaran 2022 perubahan pagu anggaran Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua terjadi sebanyak tiga (3) kali, di sebabkan adanya Automatic Adjustment, dan pemenuhan kebutuhan operasional pimpinan. Perubahan pagu tersebut

mengakibatkan Pusat Pengendalian Pembangunan ekoregion Papua harus melakukan penyesuaian/ adaptasi pelaksanaan kegiatan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya target output dan menunda kegiatan-kegiatan pendukung yang dapat di laksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel Revisi Pagu Anggaran P3E Papua Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu Awal	Revisi AA Tahap I	Revisi AA Tahap II	Revisi Belanja Operasional Pimpinan	Pagu Akhir
Belanja Pegawai	3,796,134,000	219,268,000			3,576,866,000
Belanja Barang	9,539,554,000	470,539,000	888,800,000	35,000,000	8,145,215,000
Belanja Modal	100000000	0	0	0	100,000,000
Jumlah	13,435,688,000	689,807,000	888,800,000	35,000,000	11,822,081,000

Tabel Realisasi Anggaran

Jenis Belanja	Pagu Alokasi	Realisasi	Persen Realisasi
Belanja Pegawai	3.576.866.000	3.199.799.866	89.46
Belanja Barang	8.145.215.000	7.306.649.027	89.70
Belanja Modal	100.000.000	99.998.000	100
Jumlah	11.822.081.000	10.606.446.892	89.72

Sumber: OMSPAN 02 Desember 2022

Realisasi anggaran P3E Papua per tanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp. 10.606.446.892 atau 89.72 persen. Realisasi Belanja Modal telah mencapai 100 persen. Prognosis realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.11.669.091.530,- atau sebesar 98,71 persen. Sisa Pagu anggaran sebesar Rp. 152.989.470,- atau 1.29 persen di perkirakan adalah belanja pegawai yang tidak dapat di realisasikan sebesar Rp. 125.020.637 dan belanja barang sebesar Rp.27.968.833.

Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu Alokasi	Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi	Prognosis Persen Realisasi	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai	3.576.866.000	3.199.799.866	3.454.845.363	96.59	122.020.637
Belanja Barang	8.145.215.000	7.306.649.027	8.136.518.021	99.89	8.696.979
Belanja Modal	100.000.000	99.998.000	99.998.000	100	2000
Jumlah	11.822.081.000	10.606.446.892	11.691.361.384	98.89	8.696.979



3. Rencana Kerja Tahun 2023

VISI DAN MISI KLHK

VISI

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Guna mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

- 1 Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
- 2 Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
- 3 Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola hutan
- 4 Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik

VISI, MISI DAN TUJUAN SEKRETARIS JENDERAL



Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan dukungan manajemen KLHK yang professional guna menjamin terwujudnya keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan masyarakat untuk mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholder KLHK
2. Memantapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KLHK
3. Menciptakan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KLHK



Tujuan dari Sekretaris Jenderal merupakan penjabaran dari visi dan misi Sekretariat Jenderal yang menjelaskan kondisi yang akan di capai secara umum, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien
2. Memantapkan tata Kelola kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan system administrasi dan kinerja yang transparan dan akuntabel

Pusat Pengendalian Pembangunan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.

P3E Papua mendukung tercapainya target kinerja Sekretariat Jenderal. Dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi disebutkan terdapat perubahan struktur kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk juga di lingkup Sekretariat Jenderal. Perubahan tersebut terjadi sehubungan dengan di tetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan mulai berlaku pada pemerintahan tahun 2023.

Tahun 2023 diberlakukan 13 Sasaran Strategis (SS) KLHK dimana Sekretariat Jenderal akan mendukung Sasaran Strategis ke 13 yaitu “Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien”. Indikator Kinerja Program adalah Nilai Reformasi Birokrasi.

P3E Papua melaksanakan kegiatan pengendalian pembangunan LHK pada wilayah ekoregion dengan sasaran kegiatan meningkatnya pengendalian pembangunan LHK ekoregion Papua dan indikator kinerja kegiatan tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E dan Jumlah pemda di bina dan difasilitasi di wilayah ekoregion. Target kinerja tahun 2023 ditunjukkan sebagai berikut.

TARGET KINERJA TAHUN 2023

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
Pengendalian Pembangunan LHK Regional	Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3e	4	Poin
		Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ecoregion	8	Daerah

RINCIAN KEGIATAN

Rencana kegiatan pengendalian pembangunan LHK regional di wilayah ekoregion Papua tahun 2023 dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi P3E Papua; Arahan pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan KLHK dan Sekretariat Jenderal dan tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 P3E Papua. Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Papua. Kondisi lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi dasar disusunnya kegiatan P3E Papua secara umum disampaikan berikut ini:

- 1) Isu pencemaran wilayah ekoregion Papua
- 2) Isu kerusakan wilayah ekoregion Papua
- 3) Isu pengelolaan sampah di wilayah ekoregion Papua
- 4) Isu pengelolaan limbah B3 di wilayah ekoregion Papua
- 5) Isu Perencanaan pembangunan daerah belum sejalan/ sinkron dengan kebijakan/ instrument LHK
- 6) Isu dampak pembangunan di wilayah ekoregion Papua

Sesuai dengan tugas dan fungsi P3E Papua maka

upaya pengendalian pembangunan ecoregion Papua yang dikerjakan sebagai Langkah untuk menghadapi isu lingkungan di Ekoregion Papua yaitu:

1. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua.
2. Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion
3. Layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion.

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjakan mengacu pada proses bisnis pengendalian pembangunan ekoregion sebagai berikut.

Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target/ Lokus
Layanan koordinasi perencanaan pembangunan ekoregion	1. Ketidak seimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan ecoregion	1. Penyusunan rencana inventarisasi dan koordinasi stakeholder 2. Inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan LHK di Kawasan Teluk Cenderawasih 3. Inventarisasi perencanaan pengendalian LHK di Manokwari	8 Pemda
	2. Belum tersedianya database dokumen perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion Papua.	Analisis data dan informasi pengendalian pembangunan ecoregion	1. Analisis data dan informasi perencanaan pengendalian LHK di Manokwari 2. Analisis data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan LHK Teluk Cenderawasih	
	3. Perlunya integrasi dokumen perencanaan yang menyeluruh sebagai alat dalam pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Papua diantaranya yaitu RPJMD, Daya Dukung Daya Tampung, RPPLH, Inventarisasi Kehati, Rencana Pengelolaan lingkup UPT KLHK, KLHS, IKPLHD dan IKLH		Sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan ecoregion	

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target/ Lokus
Layanan koordinasi perencanaan pembangunan ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidak seimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 2. Belum tersedianya database dokumen perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion Papua. 3. Perlunya integrasi dokumen perencanaan yang menyeluruh sebagai alat dalam pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Papua diantaranya yaitu RPJMD, Daya Dukung, Daya Tampung, RPPLH, Inventarisasi Kehati, Rencana Pengelolaan lingkup UPT KLHK, KLHS, IKPLHD dan IKLH 	Fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan LHK di Manokwari 2. Fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan ecoregion di Kawasan Teluk Cenderawasih 	<p>FGD pembahsan isu strategis bidang LHK Ekoregion Papua</p> <p>Peningkatan Kapasitas</p>

Penerapan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, Sampah, Limbah B3

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target/ Lokus
Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	1. Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan di segala aspek. 2. Kebutuhan instrument yang terencana dan komprehensif untuk memadukan segala aspek kehidupan (ekonomi, sosial dan budaya, politik, lingkungan hidup)	Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion	1. Penyusunan rencana, koordinasi stakeholder, dan supervise dalam rangka fasilitasi pengendalian pence,aran wilayah Ekoregion Papua 2. Bimbingan teknis pengelolaan laboratorium di Kabupaten Sorong 3. Bimbingan teknis perhitungan indeks kualitas air di Kabupaten Timika	8 Pemda
		Fasilitasi Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion	1. Penyusunan rencana dan koordinasi stakeholder dalam rangka fasilitasi pengendalian kerusakan wilayah di ecoregion Papua 2. Sosialisasi kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan di Kabupaten Manokwari 3. Pemantauan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah ecoregion papua	

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target/ Lokus
Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	1. Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan di segala aspek. 2. Kebutuhan instrument yang terencana dan komprehensif untuk memadukan segala aspek kehidupan (ekonomi, sosial dan budaya, politik, lingkungan hidup)	Fasilitasi pengendalian kerusakan wilayah ekoregion	1. Penyusunan rencana, koordinasi stakeholder, dan supervise dalam rangka fasilitasi pengelolaan sampah wilayah ecoregion Papua 2. Sosialisasi pengurangan sampah di Kepulauan Yapen 3. Sosialisasi pengurangan sampah di Kabupaten Teluk Wondama 4. Bimbingan teknis penyusunan Jakstrada dan SIPSN di Kabupaten Waropen	
		Fasilitasi pengelolaan sampah wilayah ekoregion	1. Penyusunan rencana dan koordinasi stakeholder dalam rangka fasilitasi pengelolaan limbah B3 wilayah ecoregion Papua 2. Bimbingan teknis pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Biak Numfor 3. Pemantauan dalam rangka pengelolaan sampah, limbah dan B3 di wilayah ecoregion Papua Peningkatan kapasitas	

Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target/ Lokus
Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Wilayah Ekoregion	1. Fluktuasi angka IKLH di Ekoregion	Evaluasi penerapan pengendalian pencemaran wilayah ecoregion	1. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka evaluasi penerapan pengendalian pencemaran wilayah ecoregion	
	2. Masih banyaknya kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum melakukan penghitungan IKA		2. Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran di Kota Sorong	
	3. Peningkatan jumlah pencemaran air dan udara	Evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah ekoregion	1. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah ecoregion	
	4. Banyaknya kabupaten / kota yang belum menyusun Jakstrada Pengelolaan Sampah		2. Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah pesisir di Kabupaten Supiori	
	5. Perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di beberapa daerah belum mengacu pada Jasa Ekosistem yang ada pada daerah tersebut	Evaluasi penerapan pengendalian pengelolaan sampah wilayah ekoregion	3. Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran di Kabupaten Kepulauan Yapen	
			1. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka evaluasi penerapan pengendalian pengelolaan sampah wilayah ekoregion	

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target/ Lokus
Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Wilayah Ekoregion	1. Fluktuasi angka IKLH di Ekoregion		2. Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian sampah di Kabupaten Biak Numfor	
	2. Masih banyaknya kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum melakukan penghitungan IKA		3. Monitoring dan evaluasi penerapan jakstrada dan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Manokwari Selatan	
	3. Peningkatan jumlah pencemaran air dan udara	Evaluasi penerapan pengelolaan limbah B3 wilayah ekoregion	1. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka evaluasi penerapan pengelolaan limbah B3 wilayah ekoregion	
	4. Banyaknya kabupaten / kota yang belum menyusun Jakstrada Pengelolaan Sampah		2. Monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan limbah medis di Kota Jayapura	
	5. Perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di beberapa daerah belum mengacu pada Jasa Ekosistem yang ada pada daerah tersebut	Evaluasi dampak pembangunan ekoregion	1. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pembangunan ekoregion 2. Monitoring dan evaluasi dampak pembangunan LHK di Kabupaten Teluk Wondama	

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target/ Lokus
Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Wilayah Ekoregion	1. Fluktuasi angka IKLH di Ekoregion		3. Monitoring dan evaluasi dampak pembangunan LHK di Kabupaten Keerom	
	2. Masih banyaknya kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum melakukan penghitungan IKA		4. Monitoring dan evaluasi penerapan jakstrada dan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor	
	3. Peningkatan jumlah pencemaran air dan udara			Peningkatan Kapasitas
	4. Banyaknya kabupaten / kota yang belum menyusun Jakstrada Pengelolaan Sampah			
	5. Perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di beberapa daerah belum mengacu pada Jasa Ekosistem yang ada pada daerah tersebut			

SURVEY KEPUASAN PUBLIK

A. Ruang Lingkup

Pelaksanaan SKPP dilaksanakan terhadap layanan Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, Bidang Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Wilayah Ekoregion, dan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Satker P3E Papua.

B. Persiapan

1. Pelaksana

Pelaksana SKPP adalah Bagian Tata Usaha P3E Papua. Tim Penyusun Survei Kepuasan Pelayanan Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala P3E Papua dengan Nomor: SK.034/P3E.Papua/KBTU/04/2022 Tentang Tim Penyusun Survei Kepuasan Pelayanan Publik Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua.

2. Waktu Pelaksanaan Pengukuran

Pengukuran SKPP dilakukan di setiap kegiatan pada bidang terkait, dengan responden adalah peserta kegiatan. Pengukuran dilaksanakan

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuisisioner oleh pengguna/penerima layanan P3E Papua. Kuisisioner SKPP diisi dengan memberi skor 1-5 (sangat tidak puas-sangat puas) terhadap unsur layanan P3E Papua.

D. Pengolahan dan Analisa Data

Kuisisioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor 14 tahun 2017. Pelaksanaan SKPP dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data akan diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat dan hasil survey dapat lebih bermanfaat.

- Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode pengukuran Skala Likert 1. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan.

Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut.

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = nilai bobot per unsur

Persamaan untuk menghitung Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut.

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 20 dengan rumus sebagai berikut. $SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 20$

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

2. Perangkat Pengolahan

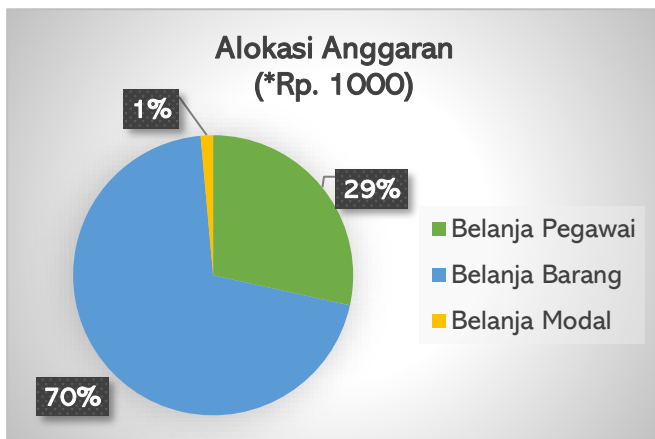
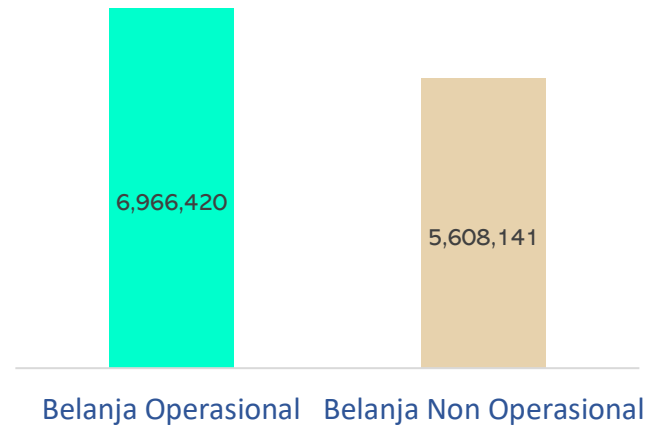
Data entry dan penghitungan survey dapat dilakukan dengan program komputer/ sistem data base (Microsoft Excel).

ANGGARAN

Berdasarkan Memorandum Sekretaris Jenderal Nomor: M.21/SETJEN/ROCAN/REN.0/10/2022, Pagu anggaran P3E Papua Tahun 2023 bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 12.574.561.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 6.41 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2022.

Alokasi anggaran terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 6.966.420.000,- dan Belanja Non Operasional sebesar Rp. 5.608.141.000. Berdasarkan jenis belanja dibagi menjadi 3, yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.576.866.000,-, Belanja Barang sebesar Rp. 8.817.695.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 180.000.000,-

Jenis Belanja	Pagu Alokasi (Rp.)	Persen
Belanja Pegawai	3.576.866.000	28.45
Belanja Barang	8.817.695.000	70.12
Belanja Modal	180.000.000	1.43
Jumlah	12.574.561.000	



KERANGKA PENDANAAN

Kegiatan	KRO	RO	Target RO	Komponen	Anggaran (Rp. *1000)
Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	1 Layanan	055. Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan	1.705.034
		994. Layanan Perkantoran	2 Layanan	001. Gaji dan Tunjangan	3.576.866
				002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.389.554
	EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951. Layanan Sarana Internal	12 Unit	051. Pengadaan Peralatan dan Mesin	180.000
	FBA. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005. . Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	8 Daerah	052. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	1,345,795
				052. Layanan Pembinaan dan Penerapan PPKL, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Wilayah Ekoregion	1.204.222
				053. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	1.173.090



4. Penutup

Pengendalian pembangunan bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pembangunan. Bentuk pengendalian pembangunan adalah dengan menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2023 merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengendalian pembangunan Ekoregion Papua.

Pelaksanaan rencana kerja dijabarkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 bagi bidang/ bagian di lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua. Namun demikian, apabila sekiranya dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyempurnaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta Rancangan APBN Tahun 2023, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislatif. Selain digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2023, rencana kerja tahunan ini juga selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun

2023, tentu saja dengan melakukan penyesuaian-penyempurnaan sehubungan dengan kemungkinan adanya perubahan-perubahan prioritas dalam APBN Tahun 2023.

Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Papua. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Tantangan terbesar dalam upaya pengendalian pembangunan ekoregion Papua adalah mempertahankan kualitas lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung namun sekaligus dapat memberikan manfaatnya untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, dalam mendukung pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.



PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA